

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan keuangan berkualitas tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan tersedia dipahami. Relevan, yaitu informasi yang terkandung didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna, membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau sekarang dan memprediksi masa depan dan mengkonfirmasi atau meningkatkan hasil penilaian mereka sebelumnya (Kristaliahadi *et al.*, 2017).

Kerangka konseptual kualitas laporan keuangan di Indonesia erat kaitannya dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang menetapkan prinsip-prinsip dan panduan untuk menyusun laporan keuangan. SAK dapat menciptakan landasan kerja yang mengarah pada penyajian informasi keuangan yang konsisten, transparan dan dapat diandalkan. Afiah (2017) menjelaskan bahwa tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah memberikan informasi berkualitas tinggi tentang entitas ekonomi dan kondisi keuangan, yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang berkualitas tinggi memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menggunakan informasi tersebut dalam mengevaluasi kinerja ekonomi dan diharapkan informasi ini akan membantu mereka dalam mengukur kesehatan entitas yang dilaporkan serta membuat keputusan keuangan yang didasarkan pada fakta (Alhassan *et al.*, 2022).

Menurut Peraturan Pemerintah no 71 informasi dari laporan keuangan tahun 2010 dianggap berkualitas tinggi dan berguna, jika informasi hasil dapat membantu pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh pengguna (Erviana *et al.*, 2017). Laporan keuangan pemerintah diartikan sebagai laporan terstruktur mengenai status dan transaksi keuangan

dilakukan oleh entitas pelapor (Listiani *et al.*, 2018). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berhati-hati memberikan informasi menyajikan dalam laporan dana untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengembalian keputusan. Jika informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang tidak konsisten kriteria nilai informasi yang diminta oleh hukum akan menimbulkan masalah (Yensi *et al.*, 2014).

Ketidaktegasan pemerintah daerah Kabupaten Bantul bermula dari lambatnya tindakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap temuan sistem pengendalian intern tanggung jawab pelaksanaan APBD tahun 2019. Temuan BPK atas laporan keuangan Bantul tahun 2021 menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah kabupaten masih lemah dan pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan masih lemah dibandingkan laporan-laporan sebelumnya (Tribun Jogja, 27 Juli 2021).

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas fiskal di daerah serta memberikan gambaran mengenai kinerja suatu daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD yang berkualitas tinggi memiliki manfaat signifikan dalam mendukung pengambilan kebijakan pemerintahan daerah di masa depan (Pujanira dan Taman 2017). Sejalan dengan hal ini, Muraina dan Dandago (2020) berpendapat bahwa laporan keuangan yang berkualitas tinggi juga berperan penting dalam membantu lembaga donor, investor domestik maupun internasional, serta pembayar pajak dalam mengambil keputusan strategis dan mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, pelaporan keuangan yang berkualitas dapat menjadi landasan bagi peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

LKPD yang berkualitas tinggi adalah laporan yang dalam proses penyusunan minim terjadi kecurangan. Sesuai dengan ayat Q.S Al-Mutaffin:7

إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِينٍ كَلَّا

“Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijn”.

Ayat tersebut berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan dengan kegunaan yang baik, tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan organisasi.

Sistem Pengendalian Internal yang tidak efektif dalam suatu organisasi dapat mendorong terjadinya kecurangan dan menimbulkan kerugian bagi organisasi. SPI yang tidak efektif membuat karyawan lebih cenderung melakukan penyimpangan demi keuntungannya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan ketidakefektifan pengendalian internal dengan adanya kecurangan dalam organisasi (Saputra dan Atmadja 2017).

Untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin memberikan opini SPI terhadap LKPD guna mendeteksi keberadaan kecurangan. Opini yang diberikan oleh BPK menjadi indikator kritis untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Verawaty *et al.*, 2021).

Menurut informasi yang dilansir oleh *Website* BPK Pada tahun 2022, hasil pemeriksaan sebesar 541 LKPD tahun 2021 menyatakan bahwa sebanyak 500 LKPD (92,4%) memperoleh opini” Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, dan 3 LKPD (0.6%) memperoleh opini” Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)”.

**Tabel 1 1 Opini LKPD Tahun 2019-2021 di Pemda Bantul**

OPINI	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Wajar tanpa Pengecualian	485	486	500
Wajar dengan Pengecualian	50	49	38
Tidak Menyatakan Pendapat	6	4	3

Sumber: [bantulkab.go.id](http://bantulkab.go.id)

Evaluasi ini menunjukkan kemajuan dalam kualitas LKPD, karena pemerintah daerah telah melakukan perbaikan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan ringkasan Ikhtisar Hasil Pemerintah Semester (IHPS) I Tahun 2021, terungkap bahwa meski menggunakan standar akuntansi sebagai pedoman, namun masih terdapat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. BPK menyebut masih banyak kesalahan dalam penyajian laporan keuangannya. Sebanyak 6.965 temuan yang mencakup 11.910 permasalahan terkait pelanggaran hukum atau kelemahan Kualitas Laporan Keuangan. Lebih dari setengahnya yaitu 54,9%, terkait dengan pelanggaran sebesar Rp 2,35 Triliun, sedangkan sisanya sebesar 45,1%, disebabkan oleh permasalahan Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan *website* Kabupaten Bantul, Pemkab Bantul merupakan salah satu daerah yang mendapat WTP dari BPK selama 12 kali berturut-turut dalam Sistem Pengendalian Intern Pemkab Bantul tahun 2021. Pemprov Bantul berhasil memperoleh opini WTP yang ke-12 berturut-turut dari BPK terkait Sistem Pengendalian Intern Tahun Anggaran 2021, namun hasil review Perubahan Renstra Otoritas Pengelola Aset Keuangan (Lenstra) Bantul (2021) menunjukkan bahwa laporan tersebut tidak mematuhi format, peraturan utama, atau prinsip akuntansi. Selanjutnya menurut penelitian Segarawasesa (2022) di Pemkab Bantul pada bagian keuangan OPD Kabupaten Bantul, dari 87 pegawai yang mendapat pelatihan akuntansi, hanya 33 orang, lebih banyak dari jumlah pegawai total yaitu sebesar 38%. Jumlah sisanya 62% yang dilatih di bidang lain.

Sumber daya manusia yang tidak kompeten mengalami kesulitan menyelesaikan tugasnya secara efisien, efektif dan ekonomis. Tidak menutup kemungkinan juga pekerjaan yang dilakukan tidak dapat selesai tepat waktu sehingga mengakibatkan terbuangnya waktu dan tenaga (Erawati dan Shintia 2017). Di sisi lain, memiliki staf dengan kemampuan akuntansi

yang baik dapat menghemat waktu dalam menyiapkan laporan keuangan. Hal ini, dikarenakan individu tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu serta mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Menurut Usman *et al.*, (2021), pegawai yang memiliki kemampuan akuntansi dapat lebih memahami logika akuntansi, sehingga menjamin integritas laporan keuangan.

Fenomena tentang laporan keuangan pemerintah saat ini sedang menjadi hal yang menarik untuk dibahas lebih dalam, karena ditemukannya fakta bahwa masih ada penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh BPK (Indriasih *et al.*, 2014). Hal tersebut yang menjadikan meningkatnya tuntutan masyarakat tentang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa fenomena yang terjadi pada Provinsi Yogyakarta yang menjadi catatan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada tahun 2019, peraturan Gubernur Yogyakarta mengenai ketentuan perjalanan dinas belum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selain itu sistem pengendalian internal juga memiliki peran penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

HR. Muslim Nomor 3415:

فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكُنْتُمْ مَخِيطًا فَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa dari kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami (meskipun) sebuah jarum, atau sesuatu yang lebih kecil daripada itu, maka hal itu termasuk ghulul (pencurian) yang pada hari kiamat akan ia bawa."*

Hadist Riwayat Muslim diatas menjelaskan bahwa peringatan terhadap orang yang diberi amanah dan menyalahgunakannya (misalnya dengan mencuri sesuatu yang bukan miliknya)

dapat disebut pencurian dan korupsi. Tugas Sistem Pengendalian Internal adalah meminimalkan terjadinya kegiatan penipuan yang dapat merugikan pemerintah daerah dan rakyat.

Murphy (2006) menjelaskan bahwa peran kunci sistem pengendalian internal dalam menentukan kualitas laporan keuangan dapat dilihat melalui meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank atau Lembaga Pemerintahan pusat serta daerah wajibkan membentuk sistem pengendalian internal untuk memastikan efektivitas operasi organisasi (Lorenza *et al.*, 2018). Tugas sistem pengendalian internal melibatkan penyelenggaraan pemerintah negara, evaluasi kinerja, keandalan pelaporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pandangan Bulan dan Sinambow (2017) sistem pengendalian Internal bertanggung jawab atas pengawasan kinerja organisasi dan indentifikasi potensi penyimpanan. SPI bertindak sebagai pengontrol dan pengawas dalam penyusunan laporan keuangan dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan tersebut disampaikan tepat waktu, sesuai dengan tujuannya dan akurat sesuai dengan standar. Dengan kata lain sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sesuai dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Yusran (2023), Rahmawati *et al.*, (2022) yang menunjukkan bahwa SPI memiliki hubungan positif dengan kualitas laporan keuangan.

Kemampuan akuntansi berfungsi sebagai prinsip kemampuan akuntansi dan pedoman untuk membuat atau menyajikan proses penyusunan laporan keuangan dan memberikan akuntansi pemerintahan, agar pemerintah dapat membuat laporan keuangan yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai kemampuan untuk memahami kemampuannya dengan baik, dimungkinkan untuk memberikan informasi yang berguna kepada pengguna laporan sekuritas.

Kualitas laporan keuangan berperan sebagai mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan memperoleh informasi yang baik. Dengan kata lain, penyusunan laporan keuangan memiliki dampak yang signifikan pada kegunaan laporan keuangan, sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati *et al.*, (2022), Alminanda *et al.*, (2018), Insani dan Emilda (2014) serta Anugrawan dan Prajitno (2016) yang menunjukkan bahwa Kualitas laporan keuangan memiliki hubungan positif dengan kegunaan laporan keuangan.

Dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, perlu diperhatikan pula kegunaan laporan keuangan. Menurut Nugraeni (2015), kegunaan laporan keuangan berperan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diharapkan memberikan manfaat yang optimal hanya pemerintah daerah dan masyarakat. Kegunaan laporan keuangan mencakup seluruh prosedur-prosedur yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Faktor kemampuan akuntansi yang baik dan pengawasan sistem pengendalian internal, penggunaan laporan keuangan, dan kualitas laporan keuangan juga perlu diperhatikan. Menurut Anto dan Yusran 2023, kemampuan akuntansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah harus selalu ditinjau ulang untuk menjamin akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan mencegah hilangnya sumber daya keuangan, agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi daerah pemerintah dan masyarakat.

Faktor SPI berperan sebagai pengendali dan pengawas dalam penyusunan laporan keuangan, agar laporan keuangan tersebut disampaikan tepat waktu, dengan cara yang benar dan baku guna memperoleh opini SPI yang baik, yang merupakan dampak dari pengendalian

intern terhadap kualitas laporan keuangan Winidyaningrum (2009). Internal Control System (ICS) mencakup semua proses, sistem, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan, termasuk yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Marfuah (2018). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Syarifudin *et al.*, (2014), Rahmawati *et al.*, (2022), Anto dan Yusran (2023) menunjukkan bahwa SPI berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan utama.

Berbagai faktor dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah termasuk kompetensi stafnya. Namun, permasalahan umum di kalangan pemerintah daerah bahwa rencana individual seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini seiring dengan berkembangnya organisasi yang hanya mempertimbangkan kewenangan, padahal kualitas pelaporan keuangan harus tetap dihormati dan tidak sepadan dengan kompetensi (Sudarmanto *et al.*, 2009).

Selain itu, yang mendasar dari faktor kegunaan pelaporan keuangan pemerintah adalah penerapan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah (SAPD) untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan (SAP) Rachmawati *et al.*, (2016). Terapkan standar akuntansi dalam persiapan bidang pelaporan keuangan salah satunya adalah sistem akuntansi.

Faktor lain adalah kemampuan akuntansi, sistem pengendalian internal juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar berguna dalam pengambilan keputusan (Mardi *et al.*, 2011). Selain kegunaan pelaporan keuangan, struktur akuntansi pemerintah diimplementasikan sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan negara (Rizka *et al.*, dan Gowon *et al.*, 2021). Dalam hal ini kegunaan pelaporan keuangan adalah untuk menganalisis kinerja pemerintah untuk membuat prediksi tentang arah masa depan

pemerintah dan juga dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal Zamzami (2021). Terintegrasi ke dalam penggunaan pelaporan keuangan merupakan faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, merupakan riwayat pekerjaan yang menjadi milik setiap karyawan atau pelamar kerja. Faktor manusia dalam mencapai tujuan organisasi sangat bervariasi penting, pentingnya faktor manusia dalam mencapai tujuan organisasi berubah (Ismanto *et al.*, 2005).

Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas penyusunan laporan keuangan. Salah satu faktor utama yang berperan penting dalam proses ini adalah pengetahuan akuntansi. Winarsih *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa kemampuan akuntansi merupakan katalis utama penerapan sistem akuntansi dan pengumpulan informasi yang akurat. Informasi ini kemudian diolah menjadi laporan keuangan yang berkualitas tinggi yang menjadi dasar pengambilan kepentingan oleh pemangku kepentingan.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat kesenjangan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh langsung dan tidak langsung kemampuan akuntansi, dan SPI dengan kegunaan laporan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan berfokus pada konsistensi temuan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dan mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Teori agensi (*Agency Theory*) mendukung hubungan antara kualitas laporan keuangan dengan kegunaan laporan keuangan pemerintah daerah di mana kualitas penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa LKPD harus diungkapkan secara

wajar berdasarkan standar akuntansi pemerintah (Rahmawati *et al.*, 2022). Dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memiliki menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian yang tertarik untuk melakukan penelitian tersebut akan dibahas yaitu berjudul **“Pengaruh Kemampuan Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kegunaan Laporan Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris Di Pemerintah Daerah Bantul)”**. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati *et al.*, (2022) dengan menambahkan variabel kemampuan akuntansi dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen. Pembaruan dari penelitian ini selain menambah variabel adalah menggunakan Pemda Bantul sebagai objek penelitian. Menurut Usman *et al.*, (2021), sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan pengalaman dapat memahami logika akuntansi dengan baik, sehingga dapat menghasilkan integritas keuangan. Dalam konteks ini, pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang memiliki kemampuan akuntansi yang baik. Dalam penelitian ini kualitas laporan keuangan dijadikan sebagai variabel mediasi di Pemerintah Bantul dan keberadaannya secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang mengatur tata cara penyusunan laporan keuangan yang baik

Penelitian ini juga memperkenalkan variabel baru yaitu kemampuan akuntansi sebagai variabel independen. Kemampuan akuntansi merujuk pada temuan Winarsih *et al.*, (2021) dinilai berdampak positif terhadap kegunaan pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan memasukkan variabel-variabel baru tersebut. Menguji dampak kapabilitas akuntansi dan SPI terhadap kualitas pelaporan keuangan dalam konteks pemerintahan.

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap masalah yang dihadapi sehingga memudahkan penelitian. Dari berbagai faktor yang berbeda mempengaruhi kualitas laporan keuangan OPD, penelitian ini hanya bersifat perhitungan saja melakukan pengujian terhadap empat variabel pembatas, yaitu kemampuan akuntansi, dan sistem pengendalian internal, terhadap kegunaan laporan keuangan dengan kualitas pelaporan keuangan untuk mempersempit ruang lingkup pencarian.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah. Bagaimana masalah - masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah Kemampuan Akuntansi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bantul?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bantul?
3. Apakah Kualitas Laporan Keuangan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bantul?
4. Apakah Kemampuan Akuntansi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bantul?
5. Apakah Sistem Pengendalian Internal secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bantul?
6. Apakah Kemampuan Akuntansi secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan?

7. Apakah Sistem Pengendalian Intern secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kemampuan akuntansi terhadap kegunaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Bantul.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kegunaan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Bantul
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kegunaan laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Kemampuan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bantul
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bantul.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Kemampuan Akuntansi terhadap Kegunaan Laporan Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan.
7. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Kegunaan Laporan Keuangan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Setiap pencarian diharapkan mampu memberikan manfaat berkontribusi untuk semua. Mirip dengan penelitian ini, untuk manfaat dari kajian ini adalah:

##### **1. Manfaat secara teoritis**

Penelitian ini bermanfaat khususnya untuk mengembangkan pengetahuan akuntansi sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan bukti empiris mengenai dampak keterampilan akuntansi dan sistem

pengendalian internal terhadap kegunaan laporan keuangan dengan kualitas laporan keuangan sebagai alat variabel perantara.

## **2. Manfaat secara praktis**

### a) Bagi Pemerintahan Daerah

Dengan adanya masukan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk terus berperan dalam meningkatkan kemampuan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Bantul.

### b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang dapat membantu masyarakat dalam memahami dampak kemampuan akuntansi dibidang akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada peran kualitas laporan keuangan sebagai variabel sentral waktu.

### c) Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian yang akan datang.

### d) Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian literature yang ada mengenai dampak kemampuan akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kegunaan laporan keuangan. Fokus penelitian juga mencakup peran kualitas pelaporan keuangan sebagai faktor yang memediasi hubungan antara kemampuan akuntansi dan sistem pengendalian internal serta kegunaan pelaporan keuangan.